

Kontrak Kuliah, RPS & Ruang Lingkup

KULIAH 1

Mata Kuliah: Analisis Kebijakan Publik

Kamis, 10 Maret 2022

Program Studi Ilmu Administrasi Negara,

FISIP-UNS

Drs. Sudarmo, MA., Ph.D

Pendahuluan

- ◆ Analisis kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang (of) dan dalam (in) atau untuk (for) proses pembuatan kebijakan
- ◆ Dalam menciptakan pengetahuan tersebut, para analis melakukan investigasi sebab-sebab, konsekuensi-konsekuensi, dan kinerja kebijakan publik beserta program-program yang telah dilaksanakannya

Ciri definisi policy analysis

1. Aktivitas kognitif
2. Aktivitas kolektif
3. Aplikasi (penerapan) disiplin intelektual
4. Berkenaan dengan masalah publik

1. Aktivitas Kognitif

- **Aktivitas kognitif:** *learning* dan *thinking*; salah satu aspek dari proses kebijakan dimana masalah didefinisikan, ditentukan, dipecahkan dan ditinjau ulang.
- Dalam proses kognitif analysts akan mempelajari kemungkinan adanya konflik-kerjasama msl antara: (1) 'para pemilih-mereka yang dipilih', (2) 'kelompok kepentingan-Dewan', (3) 'birokrat-media', dst.
- Elemen kognitif merupakan unsur yang esensial (walaupun tidak dominan) karena *policy process* sebenarnya merupakan keadaan tahapan dimana orang-orang sedang **mendiskusikan dan memperdebatkan ide-ide** mereka tentang prioritas, masalah-masalah dan solusi-solusi.

Lanjutan

- **Aspek kognitif, *thinking*** tentang posisi seseorang dalam suatu masalah kebijakan tertentu, dilakukan oleh para partisipan sepanjang mereka perlu **untuk membenarkan dan merasionalkan pendapatnya** (meskipun argumen kebijakan yang persuasif dan analisis kebijakan yang komprehensif-baik, nyaris tidak pernah berhasil mencapai konklusi yang benar-benar sempurna).
- Hal ini karena proses kebijakan merupakan proses politik yang berpijak pada “*Power* (kekuatan-Kekasaan) dan *Interests* (kepentingan-kepentingan)”.

2. Aktivitas kolektif

- Terdapat kontribusi dari para individu yang membentuk kolektivitas pengetahuan atau pengetahuan yang terorganisir mengenai masalah-masalah kebijakan.

3. Aplikasi disiplin intelektual

- reflektif (adanya hubungan antara makna konseptual yang satu dengan makna konseptual yang lainnya. Hubungan keduanya ditimbulkan dari pembicara sehingga ada efek berupa refleksi kepada makna yang lainnya).
- Creative (memiliki daya cipta)
- Imajinatif (menggunakan imajinasi; menggunakan asumsi)
- *Self-critical* dan *eksploratory*.

4. Berkenan dengan Masalah Publik

- Problem memiliki dampak pada komunitas, berbagi kepentingan dimana individu merupakan bagian dari masyarakat.

Dua aliran besar dalam analisis kebijakan

- Analisis kebijakan dari perspektif akademik
- Analisis kebijakan dari perspektif terapan

Proses kebijakan

Policy Determinants → Policy Contents → Policy Impact

analisis kebijakan akademik

analisis kebijakan terapan

Komponen dalam Proses Kebijakan

1. Determinants of policy
2. Policy contents
3. Policy Impacts

Policy determinants

- Faktor-faktor penyebab yang dipandang bertanggung jawab terhadap munculnya sebuah kebijakan.
- Faktor-faktor ini bisa meliputi kekuatan-kekuatan lingkungan yang sangat luas (faktor-faktor makro) seperti tingkat perkembangan ekonomi dan budaya politik sampai dengan faktor yang sifatnya instant/langsung atau lingkupnya lebih jelas/kecil/mikro seperti opini publik, konflik partai, pemilihan umum, tekanan kelompok kepentingan, pemberitaan media

2. Policy Content

- isi kebijakan mencakup tujuan dan keinginan-keinginan, definisi masalah, dan instrumen yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan

3. Policy Impact

- konsekuensi yang diinginkan dan yang tidak diinginkan dari suatu kebijakan

Analisis dari perspektif akademik

1. memfokuskan pada hubungan antara *policy determinant* dan *policy content*/
 - menjelaskan/menerangkan hakekat, karakteristik dan profil kebijakan;
 - berusaha menjelaskan kebijakan publik yang bisa diterapkan dalam waktu dan ruang yang berbeda (comparative);
 - berusaha menjelaskan hal-hal yang spesifik yang diidentifikasi melalui ‘general theories’;
 - tidak berusaha merubah kebijakan tetapi lebih menekankan pada usaha menjelaskan untuk memahami suatu kebijakan;

Lanjutan

- analis melakukan analisis dan penelitiannya secara independent (tidak dikontrak/dipesan, walaupun ia dikontrak maka jarang kejadiannya);
- riset yang dilakukan mencakup ukuran waktu yang panjang dan komprehensif;
- analis (sebagai ilmuwan sosial) melihat dirinya sebagai non-partian (independent)
- Karena proses analisis tersebut seringkali dilakukan dalam situasi yang tidak stabil, maka biasanya perlu dilakukan dengan waktu cepat.

Analisis Kebijakan dari perspektif Terapan:

- memfokuskan pada hubungan antara *policy content* dan *policy impact*.
- Mencoba menjawab sejumlah pertanyaan: (1) apakah kebijakan tersebut berjalan sebagaimana mestinya? Apakah kebijakan berjalan secara efisien? Apakah ada alternatif lain yang lebih baik.
- Memfokuskan pada isi kebijakan tertentu dan masalah kebijakan dengan tujuan mengevaluasi dampak kebijakan.

Lanjutan

- Pendekatan yang dilakukan sifatnya kontekstual, berkenaan dengan kebijakan tertentu dalam suatu kondisi tertentu (tidak terlalu berkepatutan pada 'wilayah' teori).
- Tujuan dilakukan evaluasi adalah untuk memperbaiki dan merubah sehingga melibatkan aspek politik (yang biasanya tidak dilakukan dalam analisis kebijakan akademik).
- Biasanya dilakukan berdasarkan kontrak dengan *policy makers*
- Cenderung tidak obyektif karena dilakukan untuk kemudian hasilnya diberikan kepada *clients* sesuai dengan kepentingan dan nilai-nilai *clients* tersebut

Publik

- Ketertarikan untuk memahami kebijakan (*analysis of policy*)
- Ketertarikan untuk memperbaiki kualitas policy (*analysis for policy*)
- Ketertarikan untuk kedua aktivitas tersebut

Adakah Perbedaan antara “*Analysis of*” dan “*Analysis for*” Policy ?

- Perbedaan keduanya merupakan persoalan “keinginan untuk memahami policy lebih jauh (*analysis of*), dan ketertarikan untuk memperbaiki kualitas kebijakan (*analysis for*)
- Diluar perbedaan tersebut, *policy* berkenaan dengan “ends” (hasil atau akibat suatu tindakan) dan “means” (cara memnghasilkan suatu hasil atau akibat)
- Bagi sebagian penulis, tidak tertarik pada perbedaan keduanya (“analysis of” dan “analysis for” policy).

Analysis of policy

- *Studies of policy content*: (1) para analis berusaha menggambarkan dan menjelaskan asal muasal (genesis) dan perkembangan suatu kebijakan, (2) melakukan investigasi terhadap sebuah kasus atau lebih dengan maksud untuk melacak bagaimana sebuah policy dimunculkan, bagaimana policy tersebut diimplementasikan dan apa akibat/hasil/dampak dari kebijakan tersebut. Pada umumnya karya akademik dari *studi policy content* mengkonsentrasikan pada single policies atau single policy areas seperti kebijakan sosial, kebijakan lingkungan, kebijakan luar negeri

Lanjutan

- Studies of policy output (pada umumnya sama dengan *studies of policy content*) tetapi berusaha untuk menjelaskan mengapa tingkat belanja atau penyediaan pelayanan berbeda-beda dari waktu ke waktu, antara negara yang satu dengan negara lainnya, atau antara pemerintah yang satu dengan pemerintah lainnya
- Studies of the policy process (studi proses kebijakan), memfokuskan pada bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat dan bagaimana kebijakan dibentuk dalam suatu tindakan.

Analysis for Policy

- *Evaluation*: menandai garis batas antara *analysis of policy* dan *analysis for policy*. Studi evaluasi mengacu pada studi dampak karena is berkenaan dengan dampak kebijakan (bersifat deskriptif atau preskriptif).
- *Information for policy making*: data dikumpulkan untuk membantu *policy maker* mengambil keputusan (sering bersifat pragmatis berkenaan dengan “apa yang telah dan tengah terjadi” yang berusaha untuk meyakinkan bahwa kebijakan dan pelaksanaannya “didasarkan pada *bukti-bukti nyata*”

Lanjutan

- *Process advocacy*: para analist berusaha memperbaiki sifat sistem pembuatan keputusan melalui realokasi fungsi-fungsi dan tugas, dan melalui usaha untuk memperbaiki basis untuk membuat pilihan kebijakan melalui pengembangan sistem perencanaan dan pendekatan-pendekatan baru untuk menentukan pilihan—sub bidang administrasi negara/publik.
- *Policy advocacy*: para analis mengajukan pilihan-pilihan dan gagasan-ggasan tertentu dalam proses kebijakan, baik secara individu maupun bersama-sama dengan kelompok lain melauai kelompok penekan.